

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arindya, Radita. 2012. *Efektivitas Organisasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Ashafa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rienka Cipta.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press.
- Boen, Hendra Setiawan. 2008. *Bianglala Business Judgment Rule*. Cet. 1. Jakarta: PT. Tatanusa.
- Fuady, Munir. 2002. *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Garner, Mulyana, Asep N. 2018. *Business Judgment Rule: Praktik Peradilan Terhadap Penyimpangan dalam Pengelolaan BUMN/BUMD*. Jakarta: Grasindo.
- Harahap, M. Yahya. 2019. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pangestu, Muhammad Teguh. 2020. *Badan Usaha Milik Negara dan Status Hukum Kekayaan Negara*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGN).
- Prasetio. 2014. "Dilema BUMN: Benturan Penerapan Business Judgment Rule (BJR) dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN". Jakarta Timur: PT Rayyana Komunikasindo.
- Saryono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. 5. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Warsito, Herman. 2007. *Pengantar Metodologi Penelitian Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Widiyono, Try. 2005. *Direksi Perseroan Terbatas (Bank & Persero)*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Woon, Walter. 2009. *Company Law*. Singapore: Sweet & Maxwell.

Yakup, Bahrul IImi. 2020. *Dekonstruksi dan Reformulasi Hukum BUMN di Indonesia, Upaya Menciptakan BUMN Kesejahteraan Rakyat*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Artikel Jurnal

Arta, I Made ADY. 2017. “Status Kepemilikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero Setelah dikuasai Oleh Pihak Swasta”. *Jurnal IUS*. Vol. 5. No. 2.

Hadi, Shigeko Hadiputri, *et. al.* 2021. “Prinsip Business Judgment Rule dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi BUMN yang Melakukan Tindakan Investasi yang Mengakibatkan Kerugian”. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*. Fakultas Hukum UNPAD. Vol. 4. No. 2.

Handayani, Susi. 2013. “Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan BUMN (Persero) di Indonesia”. *Akrual*. Vol. 4. No. 2.

Lestari, Sartika N. 2015. “*Business Judgment Rule* Sebagai *Immunity Doctrine* Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia”. *Notarius*. Vol. 8. No. 2.

Mahartayasa, Made dan Putu Ratih Purwantari. 2014. “Tanggung Jawab Direksi Berdasarkan Prinsip *Fiduciary Duties* dalam Perseroan Terbatas”. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. Vol. 2. No. 4.

Muhayatsyah, Ali. 2019. “Keputusan Bisnis dan Tanggung Jawab Direksi dalam Prinsip *Fiduciary Duties* pada Perseroan Terbatas”. *Jurnal At-Tjarah*. Vol. 1. No. 2.

Orchad, Christian. 2016. “Penerapan Good Corporate Governance dalam Upaya Mewujudkan BUMN yang Berbudaya”. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 11. No. 2.

Permana, Agustino S. 2013. “Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”. *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa, Jurusan Perdata Ekonomi Fakultas Hukum, Universitas Jember*.

Phi, Nguyet Thi Minh, *et. al.* 2019. “Performance Differential Between Private and State-Owned Enterprises: An Analysis of Profitability and Leverage.” *ADB Working Paper Series*. ADBI Institute No. 950. Tokyo: Asian Development Bank Institute.

Sjawie, Hasbullah F. 2017. “Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas atas Tindakan *Ultra Vires*”. *Jurnal Hukum Prioris*. Vol. 6. No. 1.

Willemys, Ines. 2016. “Disciplines on SOEs in International Economic Law”. *Journal of International Economic Law*. Vol. 19. No. 3.

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Hashif, Azansyah. 2018. *Pertanggungjawaban Direksi PT (Persero) dalam Pengelolaan BUMN Persero (Studi Kasus terhadap PT Merpati Nusantara Airlines Tahun 2015)*. Skripsi. Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Kumalasari, Monica Dyah. 2020. *Tanggung Jawab Direksi BUMN Persero dan Pemerintah atas Potensi Kerugian yang Timbul dalam Pelaksanaan Penugasan Pemerintah Sektor Jasa Konstruksi*. Tesis. Program Magister Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

McLaughlin, Mark. 2020. “Defining a State-Owned Enterprise in International Investment Agreement”. *ICSID Review*. Singapore Management University.

Internet

Arfana, Nano Tresna. 2018, “Pemerintah: UU BUMN Ciptakan Sistem Pengelolaan Berlandaskan Prinsip Efisiensi dan Produktivitas,” *Berita Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*,
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14391>.

Arief, Andi M. dan Oktaviano D. B. Hana, 2019, “Industri Sarung Tangan Karet Khawatir Kenaikan Harga Gas Bikin Kinerja Loyo,” *Bisnis.com*,
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190926/257/1152588/industri-sarung-tangan-karet-khawatir-kenaikan-harga-gas-bikin-kinerja-loyo>.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2016, “BPK Audit Subsidi BUMN,” BPK RI, <https://www.bpk.go.id/news/bpk-audit-subsidi-bumn>.

Boby, 2021, “Daftar Perusahaan BUMN Persero dan Tbk di Indonesia,” Lifepal, <https://lifepal.co.id/media/daftar-perusahaan-bumn/>.

Embu, Wilfridus Setu, 2019, “Industri Keramik Dalam Negeri Keluhkan Tingginya Harga Gas,” Merdeka.com, <https://www.merdeka.com/uang/industri-keramik-dalam-negeri-keluhkan-tingginya-harga-gas.html>.

Gumelar, Galih, 2017, “Kemenprtrin Minta Jaringan Pipa Gas Serbu Kawasan Industri,” CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170308160052-85-198747/kemenperin-minta-jaringan-pipa-gas-serbu-kawasan-industri>.

Hutagalung, Chyntia, 2021, “Prinsip Piercing the Corporate Veil dalam Perseroan Terbatas,” Business Law, Pusat Pengembangan Hukum & Bisnis Indonesia, <https://www.pphbi.com/prinsip-piercing-the-corporate-veil-dalam-perseroan-terbatas/>.

Informasi Perusahaan PGN LNG. <https://www.pgnlng.co.id/about#top>.

Investment & Financial Service Association (IFSA), 2000, Corporate Governance A Guide for Investment Managers and Corporation, Sydney, N.S.W., Australia.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2015, Paket Kebijakan Ekonomi III, <https://www.ekon.go.id/info-sektoral/18/284/paket-kebijakan-ekonomi-iii>.

Kementerian Kreatif Republik Indonesia dan Universitas Sebelas Maret. Panduan Ringkas Memahami Badan Usaha Berbadan Hukum. Kementerian Kreatif Republik Indonesia & Universitas Sebelas Maret.

Laporan Tahunan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. 2019.

Listyarini, Tri dan Ridho Syukra, 2021, “Kebijakan Harga Gas Sukseskan Hilirisasi Sawit di Industri Oleokimia,” Investor.id, <https://investor.id/business/271312/kebijakan-harga-gas-sukseskan-hilirisasi-sawit-di-industri-oleokimia>.

Novalius, Feby, 2019, “Pengusaha Minta Harga Gas Diturunkan Jadi USD 6 per MMBTU,” Oke Finance, <https://economy.okezone.com/read/2019/09/25/320/2109228/pengusaha-minta-harga-gas-diturunkan-jadi-usd6-per-mmbtu>.

Perusahaan Gas Negara, Transformasi Kelas Dunia, https://www.pgn.co.id/tentang-kami#transformasi_kelas_dunia.

Putro, Raynas, 2021, “Ini Daftar Holding BUMN, dari Pupuk Hingga Pariwisata,” Akseleran, <https://www.akseleran.co.id/blog/ini-daftar-holding-bumn-dari-pupuk-hingga-pariwisata/>.

Ridwan, 2019, “Genjot Investasi, Asosiasi Kaca Minta Pemerintah Segera Percepat Pemberlakuan SNI Hingga Peurunan Harga Gas Industri,” Industry.co.id, <https://www.industry.co.id/read/48520/genjot-investasi-asosiasi-kaca-minta-pemerintah-segera-percepat-pemberlakuan-sni-hingga-penurunan-harga-gas-industri>.

Rini, Annisa Sulisty, 2019, “KPU Umumkan Hasil Pilpres: Industri Kaca Minta Implementasi Perpres Harga Gas Bumi,” Bisnis.com, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190522/257/925875/kpu-umumkan-hasil-pilpres-industri-kaca-minta-implementasi-perpres-harga-gas-bumi>.

Siregar dan Anisatul Umah, 2019, “Tolong Pak Jokowi! Pabrik upuk BUMN Terancam Setop Operasi,” CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191208094951-4-121245/tolong-pak-jokowi-pabrik-pupuk-bumn-terancam-setop-operasi>.

Sysadmin, 2020, “Menilik Kekayaan Gas Alam Indonesia Sebagai Salah Satu Tumpuan Kebutuhan Energi Masyarakat Indonesia,” Pertamina Gas, <http://www.pertagas.pertamina.com/Portal/Content/Read/39>.

Peraturan Perundang-undangan

OECD Guidelines on Corporate Governance of State Owned Enterprises 2005.

Understanding on The Interpretation of Article XVII of The General Agreement on Tariffs and Trade 1994.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2004 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 399).

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89).

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423).

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1033).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 114).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi benturan Kepentingan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 157).

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 89K/10/2020 tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 90K/10/MEM/2020 tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) dalam Penyaluran Gas Bumi kepada Pengguna Gas Bumi di Bidang Industri.

Siaran Pers

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Siaran Pers Kebijakan Ekonomi Paket Ke-3, Jakarta, 7 Oktober 2015.